

CORRELATION AMONG ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS), POVERTY MANAGEMENT FUND (TPF), EDUCATION FUND AND THE NUMBER OF POOR POPULATIONS IN INDONESIA¹

KORELASI ANTARA ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS), DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN (DPK), DANA PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Nuril Maulydia Aghustin, Eko Fajar Cahyono
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
nurilmaulydiaa@gmail.com*, ekofajarc@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dana ZIS dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, keeratan hubungan antara DPK dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, keeratan hubungan antara dana pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan korelasional sederhana yakni korelasi Karl Pearson. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan termasuk data sekunder, meliputi data dana ZIS dalam Miliar Rupiah, data DPK dalam Triliun Rupiah, data dana pendidikan dalam Triliun Rupiah, dan data tingkat kemiskinan dalam juta jiwa. Semua data tersebut dalam rentang periode tahun 2002-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa masing-masing dari dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. Hasil nilai koefisien korelasinya (r) secara berturut-turut adalah sebesar -0.834, -0.828, dan -0.933. Hasil hubungan ketiganya memiliki probabilitas signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan kata lain, apabila dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan mengalami kenaikan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mengalami penurunan.

Kata kunci: ZIS, DPK, Dana Pendidikan, Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the correlation between ZIS and the number of poor population in Indonesia, the correlation between DPK and the number of poor population in Indonesia, and the correlation between education fund and the number of poor population in Indonesia. The method used is a quantitative method, using a simple correlational approach namely Karl Pearson correlation. The data used is quantitative and includes secondary data taken from the official website of BAZNAS, Ministry of Finance and BPS. This research data includes ZIS in Billion Rupiahs, DPK in Trillion Rupiahs, education fund in Trillion Rupiahs, and poverty rate data in million people. All data is in the period 2002-2019. The results of this study stated that each of the ZIS, DPK, and education fund are closely and significantly related to the negative direction of the number of poor population in

Informasi artikel

Diterima: 06-05-2020
Direview: 20-08-2020
Diterbitkan: 25-08-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Nuril Maulydia Aghustin

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Nuril Maulydia Aghustin, NIM: 041311433125, yang berjudul, "Hubungan Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK), Dana Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2002-2019".

Indonesia period time 2002-2019. The results of the correlation coefficient (r) are respectively -0.834 , -0.828 , and -0.933 . The results of the three relationships have a significance probability of $0,000$ that is smaller than $\alpha 0.05$. Thus, it can be concluded that the ZIS, DPK, and education fund have an inverse relationship with the number of poor population in Indonesia. In other words, if the ZIS, DPK and education fund increase, the number of poor population in Indonesia will decrease.

Keyword: ZIS, Poverty Prevented Fund, Education Fund, and Poverty

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena klasik nan pelik yang harus dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia (Rini dkk, 2013). Bahkan dalam tataran ekstrim, kemiskinan dianggap sebagai sebab miskinnya suatu negara, sehingga pengentasan masalah kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setiap capaian program kerjanya. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat Nurkse yang dikutip oleh Kuncoro dalam Andriyanto (2011) yang menyatakan bahwa "negara miskin itu miskin karena dia miskin" (*a poor country is poor, because it is poor*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun 1970-an hingga tahun 2019 mengalami tren menurun dalam jumlah penduduk maupun persentase. Pada tahun 1970, persentase kemiskinan mencapai 60 % setara dengan 70 juta jiwa penduduk miskin. Pada tahun 1993, tingkat kemiskinan di Indonesia mampu berada pada angka 13,7 % dan setara dengan 25,9 juta jiwa. Akhirnya pada periode Maret tahun 2019, angka kemiskinan berhasil mencapai angka 9,41

% yang setara dengan 25,14 juta jiwa penduduk miskin. Namun, sekalipun data kemiskinan menunjukkan penurunan dari periode ke periode tetapi tidak mengasumsikan sirnanya permasalahan kemiskinan di Indonesia. Peran kontrol penuh dari pemerintah masih sangat perlu dilakukan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus terus digalakkan.

Pemerintah selalu berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan, baik kebijakan sektoral, moneter maupun fiskal (Pratama, 2015). Bahkan, pemerintah meluncurkan program-program khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya program bahan bakar dan tarif dasar listrik bersubsidi, BLT, PKH, RASKIN, BOS, peningkatan akses terhadap air bersih, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan, dan lainnya (BAPPENAS, 2009). Data konkret Kementerian Keuangan (2019) menyatakan bahwa anggaran dana penanggulangan kemiskinan (DPK) yang dianggarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dalam jumlah yang cukup besar dari anggaran belanja pemerintah dan hampir selalu mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015-2019 secara berurutan dana yang digelontorkan untuk program penanggulangan kemiskinan tersebut mencapai angka Rp247 Triliun, Rp258 triliun, Rp271 Triliun, Rp346 Triliun, dan Rp382 Triliun. Namun, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan khusus tersebut belum mampu secara efektif dan efisien mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif sebagai partner kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Beik (2009) menyatakan bahwa salah satu instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sedangkan menurut Musfiqoh (2002) dalam Damanhur & Nurainiyah (2016), pemberdayaan ZIS merupakan upaya untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat dan upaya untuk meminimalisir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, serta membebaskan masyarakat dari permasalahan kemiskinan. Bahkan fungsi dan peran zakat dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat telah menjadi bagian dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diprogramkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat merupakan kontributor besar dalam

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim (Outlook Zakat Indonesia, 2020).

Selain program zakat, pendidikan juga disebut-sebut menjadi solusi ampuh sebagai pemutus rantai kemiskinan, sebab melalui jalan pendidikan maka kualitas SDM akan ter-*upgrade* yang selanjutnya akan berimbas pada kesejahteraan ekonominya. Konsep tersebut dikenal dengan sebutan "Lingkaran Setan Kemiskinan" (*vicious circle of poverty*) yang dikenalkan pertama kali oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation In Underdeveloped Countries*. Menurut Putra dan Arka (2018) dalam Rossalia (2019), konsep lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menunjukkan bahwa rantai kemiskinan dapat diputus dengan meningkatkan mutu SDM melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah dengan cara memberi anggaran khusus untuk bidang pendidikan. Berdasarkan data Kemenkeu RI tercermin bahwa anggaran dana pendidikan mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya dan memiliki porsi yang cukup besar dalam anggaran belanja pemerintah, setara dengan 20% dari APBN. Anggaran dana pendidikan secara berturut-turut dari tahun 2015-2019 adalah mencapai 290 Triliun, 370 Triliun, 419 Triliun, 444 Triliun, 492 Triliun.

Besarnya anggaran dana penanggulangan kemiskinan (DPK) dan anggaran pendidikan serta besarnya potensi dana ZIS di Indonesia yang ketiganya dijadikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan menjadikan penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara ZIS, DPK, dan Dana Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis. *Pertama*, untuk mengetahui hubungan antara ZIS dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. *Kedua*, untuk mengetahui hubungan antara DPK dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. *Ketiga*, untuk mengetahui hubungan antara dana pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019.

II. LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang serba kekurangan atau tidak memiliki dalam hal pendidikan, kebersihan lingkungan, sanitasi air bersih, kesehatan yang buruk, serta kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat mobilitas (Ridho, 2019). Adapun kemiskinan menurut Bank Dunia dalam Zahroh (2017) ialah suatu kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan dalam hal pangan yang menyebabkan terjadinya kelaparan, serba kekurangan dari segi sandang, papan, serta

pendidikan. BAPPENAS (2009) menambahkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang mana ia tidak mampu memenuhi hak-hak dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta rasa aman ketika turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik guna mempertahankan dan mensejahterakan hidup.

Ditinjau melalui perspektif Islam, kemiskinan merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu miskin. Asal dari kata miskin itu sendiri adalah *sakana* bermakna tenang atau diam. Miskin menurut Imam Syafi'i adalah seseorang atau individu dimana dia telah bekerja untuk mencari rizki akan tetapi ia tidak dapat mencukupi kebutuhannya baik kebutuhan mendasar harian maupun kebutuhan tersier untuk bulanan (Shihab (2008) dalam Ratnasari dan Firdayetti, 2018). Definisi lain dari sebagian jumbuh ulama mengenai kemiskinan adalah keadaan seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dan ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta seseorang yang harus ia nafkahi atau ia tanggung hidupnya, namun ia tidak mampu mencukupi semuanya (Romdhoni, 2017).

Menurut Kuncoro (2006) dalam Winarti (2014), terdapat tiga hal utama yang menyebabkan permasalahan kemiskinan. *Pertama*, terjadinya ketidakmerataan pendapatan diakibatkan sumber daya alam yang dimiliki tidak seimbang. *Kedua*, kualitas SDM yang berbeda akibat latar belakang yang berbeda pula, seperti pendidikan,

kesejahteraan ekonomi, diskriminasi, dan genetik. *Ketiga*, perbedaan dalam hal kepemilikan modal. Berbeda dengan perspektif konvensional, Majid (2011) mengungkapkan ada beberapa penyebab kemiskinan menurut perspektif Islam. *Pertama*, keserakahan manusia dalam mengambil/menguasai hak milik orang lain. *Kedua*, ketidakmampuan SDM mengolah SDA yang telah disediakan Allah SWT. *Ketiga*, tidak adanya empati dari orang kaya kepada orang miskin karena *kebakhilan* yang masih terus dilestarikan. *Keempat*, adanya sifat manusia yang enggan berusaha dan bekerja. *Kelima*, adanya eksploitasi baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi dari golongan tertentu terhadap golongan yang lain. *Keenam*, adanya konsentrasi politik dan ekonomi pada segelintir orang. *Ketujuh*, adanya musibah dan perang.

BPS membuat 14 kriteria yang menjadi karakteristik keluarga/rumah tangga yang dikategorikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Auliah (2019) menambahkan bahwa jika dalam suatu rumah tangga terdapat sembilan dari 14 karakteristik tersebut, maka rumah tangga tersebut layak dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Diantara 14 karakteristik RSTM ialah lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu murahan, dinding rumah terbuat dari kayu atau bambu, tidak ada fasilitas kamar mandi yang memadai, dan pendapatan kurang dari Rp600 ribu.

Hubungan ZIS dan Kemiskinan

Menurut Hafidhuddin (2002), zakat secara bahasa berarti berkembang (*an-namaa'*), mensucikan (*at-thaharatu*), berkah (*al-barakatu*), dan beres (*ash-sholahu*). Sedangkan secara istilah menurut Beik (2009), zakat ialah suatu kewajiban memberikan sebagian harta benda yang sudah memenuhi persyaratan tertentu (*nishab*) dari pemiliknya (*muzakki*) kepada delapan golongan penerima (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula. Menurut al-Qardhawi (2001), tujuan utama zakat ialah menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Pramanik (1993) dalam Beik (2009) menyebutkan bahwa zakat dapat berperan penting untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Pramanik juga menyebutkan bahwa dalam kasus makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai insentif untuk meningkatkan aktivitas produksi, investasi, dan bekerja. Oleh karena itu, zakat merupakan alat transfer kekayaan terbaik dalam masyarakat. Adapun El-Din (1986) dalam Beik (2009) meneliti fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian yang hasilnya menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat digunakan untuk memerangi kemiskinan. Namun dengan catatan, pola pendistribusian zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif.

Selanjutnya, menurut Arifin (2011: 173) pengertian *infaq* ialah seluruh bentuk

kegiatan pembelanjaan berupa harta benda (materi) di jalan Allah dengan niat tulus ikhlas mengharapkan ridla Allah SWT. Adapun pengertian sedekah menurut Arifin (2011: 189-196) ialah seluruh bentuk kegiatan pembelanjaan berupa materi maupun nonmateri (misal memberikan bantuan tenaga, menahan diri dari maksiat, mengucapkan tasbih tahmid takbir tahlil, senyuman) dengan niat mengharap pahala dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Kalimat yang baik adalah sedekah*” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jika menilik zaman Rasulullah dan para sahabat, ZIS telah digalakkan pada zaman itu sebagai sarana pembersihan harta sekaligus alat distribusi kekayaan kepada yang berhak menerimanya. Dana ZIS tersebut juga digunakan pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Sebagaimana halnya kebijakan Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum *anshar* dan *muhajirin* menjadi awal terbentuknya tanggung jawab terhadap sesama, bersama-sama mengemban tanggung jawab pemenuhan kebutuhan sesamanya. Selain itu, adanya kebijakan “sehari habis” di *baitul maal* yang menjadi sumber penempatan pendapatan sekaligus pengeluaran negara untuk *kemashlahatan* umat. Kemudian, adanya kebijakan zakat yang begitu ketat pada masa pemerintahan *khalifah* Abu Bakar *as-Shiddiq*, hingga sampai terjadi perang untuk memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Sementara itu,

pada masa pemerintahan *khalifah* Umar bin Khattab semakin berkembang ketetapan objek zakat atau yang sering dikenal sebagai zakat kontemporer.

Banyak studi empiris yang telah membuktikan bahwa zakat *infaq* sedekah (ZIS) mampu menjadi salah satu solusi yang efektif dari permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Mubarakah, Beik dan Irawan (2017) mencoba meneliti dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan *mustahiq* di provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan indeks kemiskinan islami atau yang kini lebih sering dikenal dengan sebutan model *Center of Islamic Business and Economics Studies* (CIBEST) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga *mustahiq* mengalami peningkatan setelah adanya bantuan zakat dari *muzakki*. Berdasarkan model CIBEST dengan 100 sampel rumah tangga *mustahiq*, hasil penelitian menyebutkan bahwa klasifikasi rumah tangga *mustahiq* yang dikategorikan rumah tangga sejahtera sebanyak 94, sedangkan kategori rumah tangga miskin material sebanyak lima, dan kategori rumah tangga miskin absolut hanya terdiri dari satu rumah tangga. Model CIBEST dalam penelitian tersebut juga menghasilkan data empiris bahwa kesejahteraan *mustahiq* akan meningkat dan indeks

kemiskinan material mustahiq akan menurun dengan adanya bantuan zakat. Selanjutnya, Lapopo (2012) melakukan penelitian terkait dampak ZIS dan zakat fitrah terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 1998-2010. Berdasarkan uji regresi maka hasil penelitian menyebutkan bahwa dana ZIS berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hubungan DPK terhadap Kemiskinan

Sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, pemerintah senantiasa memberikan usaha terbaik dalam upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan. Secara berkala, rutin dilakukan pembaharuan program dan kebijakan tersebut guna menyesuaikan dengan kondisi pada eranya. Begitu pula dengan alokasi khusus untuk anggaran dana kemiskinan dengan nominal yang cukup fantastis mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya. Upaya-upaya pemerintah tersebut sebagai bentuk pemenuhan terhadap amanah isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa "...untuk memajukan kesejahteraan umum..." dan amanah UUD pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan seluruh rakyat terutama kesejahteraan masyarakat miskin.

Sebelum lahirnya perundang-undangan khusus untuk program

penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (2015), terdapat empat program unggulan sebelum terjadinya krisis tahun 1997-1999 di Indonesia yakni; program peningkatan produksi pertanian, program pembangunan prasarana dan sarana fisik, program pengembangan SDM khususnya bagi penduduk miskin, dan berbagai program pendukung yang. Adapun program penanggulangan kemiskinan yang menjadi kebijakan pemerintah setelah adanya krisis 1998 di Indonesia diantaranya adalah Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terkategori paling miskin. Sementara itu, program perlindungan sosial di Indonesia secara resmi baru mulai dijalankan pada tahun 2000-an, diantaranya terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ TNP2K (2010), pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baik di periode pertama (tahun 2004-2009) maupun periode kedua (tahun 2009-

2014), program pengentasan kemiskinan terbagi menjadi empat kluster yang programnya mencapai jumlah puluhan. Program-program tersebut tidak hanya diperuntukkan masyarakat miskin tetapi juga untuk masyarakat yang mendekati kategori miskin. Program penanggulangan kemiskinan kluster I berfokus pada lingkup keluarga seperti program JAMKESMAS, BLT, BSM, BOS, BIDIKMISI, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan PKH. Adapun program penanggulangan kemiskinan kluster II berfokus pada program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM mandiri yang dinisiasi dari PPK/P2KP. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan kluster III berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil misalnya KUR. Sementara itu, program penanggulangan kemiskinan kluster IV mencakup program lain-lainnya seperti penyediaan air bersih, rumah murah dan angkutan umum murah, serta penyejahteraan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin perkotaan.

Selanjutnya berdasarkan catatan Bappenas (2017), pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo terdapat sebagian program-program penanggulangan kemiskinan yang mengalami pembaharuan istilah maupun aturan tata kelolanya. Beberapa program yang mengalami pembaharuan diantaranya ialah adanya penambahan kuota bidikmisi dan PKH serta PBI JKN, pengoptimalan nilai manfaat PKH, naiknya nominal iuran PBI JKN, modifikasi

program bantuan pendidikan menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), penambahan anggaran dana desa, pengalihan istilah Raskin menjadi Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) yang selanjutnya kini bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang menjadi kebijakan pemerintah diimbangi dengan alokasi dana khusus yang cukup besar pula dari pemerintah. Bahkan tidak jarang anggaran DPK yang dialokasikan mengalami kenaikan untuk beberapa tahun. Besarnya anggaran dana penanggulangan kemiskinan yang disediakan oleh pemerintah mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut sejalan dengan tuntunan *syari'at* Islam yang mengamanatkan kepada negara untuk mengatur seluruh keperluan rakyatnya terlebih urusan perekonomian yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan pokok. Sebagaimana *hadits* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa setiap pemimpin merupakan pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, sebab ia akan dimintai pertanggung jawaban kelak.

Penelitian empiris terkait dana penanggulangan kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia juga telah cukup banyak dibuktikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Misdawita dan Sari

(2013) tentang analisis dampak pengeluaran subsidi pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia memperlihatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dengan arah negatif (berbanding terbalik) antara belanja subsidi dan kemiskinan di Indonesia. Begitu pula Andaresta (2019), yang mencoba meneliti pengaruh antara bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007-2017 dan hasilnya menunjukkan nilai koefisien negatif antara bantuan sosial dan kemiskinan yakni sebesar -0.002312 dari data panel 33 Provinsi di Indonesia.

Hubungan Dana Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu fokus utama suatu pemerintahan dalam setiap target capaian kerjanya. Pendidikan juga dianggap menjadi salah satu katalisator dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian negara, sebab pendidikan dipercaya menjadi salah satu solusi terputusnya rantai lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Putra dan Arka (2018) dalam Rossalia (2019), bahwa konsep lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menunjukkan bahwa rantai kemiskinan dapat diputus dengan meningkatkan mutu SDM melalui pendidikan yang berkualitas. Ilmu pengetahuan yang baik akan menjadi bekal masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta

berujung pada kesejahteraan hidup, sehingga pada akhirnya keterbelakangan akan sirna.

Indonesia juga menjadikan pendidikan sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Bahkan, Indonesia sudah menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus utama pemerintahan sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Kesungguhan pemerintah tersebut dibuktikan dengan adanya penggalan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...mencerdaskan kehidupan bangsa...", di mana penggalan kalimat tersebut merujuk pada tujuan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian negara melalui sistem pendidikan baik.

Kesungguhan pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pendidikan dan memfasilitasi pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia salah satunya terlihat dari besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam porsi APBN dan terus meningkatnya anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Besarnya anggaran dana tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Aimon (2012) dalam Winarti (2014), besarnya

anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bidang pendidikan akan menuai dampak yang baik bagi keberlangsungan sistem pendidikan itu sendiri. Hal tersebut akan diawali dengan meningkatkannya jumlah pelajar yang sukses merampungkan studinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Jika semakin tinggi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin mudah pula akses bekerja, berkarya, dan bekerja sama dengan kecanggihan teknologi sehingga akhirnya dapat pula meningkatkan standar ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Anggaran dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah dibagi menjadi tiga porsi anggaran. *Pertama*, alokasi anggaran dana pendidikan untuk Kementerian/Lembaga (L/K). *Kedua*, untuk dana pendidikan transfer daerah yang memuat anggaran untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional PTN, Bantuan BidikMisi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus, dan Tunjangan Sertifikasi Dosen. *Ketiga*, untuk anggaran pembiayaan. Diantara tiga porsi bagian tersebut, porsi kedua merupakan porsi yang memiliki porsi terbesar di anggaran dana pendidikan. Porsi kedua juga merupakan anggaran dana yang langsung bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang membutuhkan dalam hal pendidikan,

sebab program-program bantuan tersebut secara merata dibagikan kepada peserta didik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan bahkan hingga tingkat mahasiswa.

Bukti lain atas kesungguhan pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang baik adalah melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam membentuk lembaga pendidikan formal baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat, hingga tingkat perguruan tinggi. Kerja sama antara pemerintah dan swasta tersebut dimaksudkan agar pendidikan yang baik bisa merata di semua lapisan masyarakat Indonesia, dengan tetap mengacu pada kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

Banyak studi empiris yang telah membuktikan bahwa peran pendidikan mampu menjadi salah satu solusi yang efektif dari permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Bahkan dengan adanya pendidikan yang baik, masyarakat nantinya dianggap lebih mudah dalam mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satunya yakni penelitian Setyowati (2014), yang menilik pengaruh alokasi dana program masyarakat, belanja

kesehatan, belanja pendidikan dan pekerjaan umum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode 2008-2011. Menurut Setyowati, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan Seto (2016) dalam mengamati pengaruh lima variabel independen terhadap kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah variabel belanja pendidikan terhadap kemiskinan dalam rentang periode 2011-2014. Berdasarkan hasil uji t, belanja pendidikan secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik (negatif) dengan kemiskinan di Indonesia, nilai koefisiennya sebesar -4,255 dengan signifikansi sebesar 0,000.

Dalam Islam, pendidikan juga dianggap sangat penting dalam kehidupan. Terdapat beberapa untaian mutiara dari para ulama, yakni "Tuntutlah ilmu walau sampai negeri China" dan "Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat". Bahkan terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang mengindikasikan pentingnya pendidikan, diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Abdil Barr yang artinya adalah "Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan".

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H0: Tidak ada hubungan antara ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan kemiskinan di Indonesia

Ha: Ada hubungan antara ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan kemiskinan di Indonesia

H0: Tidak ada hubungan antara dana penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan di Indonesia

Ha: Ada hubungan antara dana penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan di Indonesia

H0: Tidak ada hubungan antara dana pendidikan dan kemiskinan di Indonesia

Ha: Ada hubungan antara dana pendidikan dan kemiskinan di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang sifatnya cenderung ilmiah/*scientific* sebab memuat kaidah ilmiah yakni konkret (empiris), objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasional sederhana, yakni uji korelasi *Karl Pearson (Product Moment)*. Penelitian ini berupaya untuk menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain guna mendapatkan sesuatu hal yang baru untuk nantinya ditarik kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk angka. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini adalah bersifat sekunder, yakni laporan keuangan ZIS dalam Miliar Rupiah yang berasal dari situs resmi

BAZNAS, laporan DPK dan dana pendidikan dalam Triliun Rupiah yang berasal dari situs resmi Kemenkeu, serta laporan tingkat kemiskinan dalam Juta Jiwa yang berasal dari situs resmi BPS. Selanjutnya, data pendukung untuk penelitian ini juga diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian terdahulu.

Adapun identifikasi dan definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Dana ZIS (X1), merupakan komponen utama lembaga dana sosial, dikenal sebagai sarana filantopi Islam yang efektif untuk mensejahterakan umat.
2. DPK (X2), merupakan belanja pemerintah di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat menengah kebawah.
3. Dana Pendidikan (X3), merupakan anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan yang ditujukan untuk proses pengadaan pendidikan yang layak khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.
4. Kemiskinan (Y), merupakan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Penelitian ini menggunakan populasi dana ZIS selama kurun waktu 2002-2019, DPK selama kurun waktu 2002-2019, dana pendidikan selama kurun waktu 2002-2019, dan angka kemiskinan

dalam juta jiwa selama kurun waktu 2002-2019. Sementara itu, sampel penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi penelitian yang ada, karena adanya penggunaan teknik sampel jenuh untuk populasi yang kurang dari angka 30. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana ZIS selama kurun waktu 2002-2019, DPK selama kurun waktu 2002-2019, dana pendidikan selama kurun waktu 2002-2019, dan angka kemiskinan dalam juta jiwa selama kurun waktu 2002-2019.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi *Karl Pearson*. Adapun teknik analisis datanya adalah melalui dua tahap. *Pertama*, melalui statistik deskriptif yang menerapkan teknik pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan penjabaran data berbentuk angka atau numerik maupun bentuk grafis. *Kedua*, melakukan analisis korelasi *Karl Pearson* untuk mengetahui keeratan (kuat lemahnya) suatu hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, terdapat dua tahapan interpretasi hasil analisis korelasi *Pearson* yaitu melihat nilai koefisien korelasi $r = -1 \leq r \leq +1$ dan melihat nilai signifikansi *Sig. 2-tailed* 0,05 (Ghozi dan Sunindyo, 2015: 215-218).

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n(\sum X^2 - (\sum X)^2)(n(\sum Y^2 - (\sum Y)^2))}}$$

r = koefisien korelasi

Y = skor variabel Y

X = skor variabel X

n = jumlah sampel

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah data dalam bentuk tabel yang meliputi dana ZIS (X1), DPK (X2), dana pendidikan (X3), dan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y):

Tabel 1.
Analisis Statistik Deskriptif

| Periode | X1 | X2 | X3 | Y |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| 2002 | 68.39 | 16.5 | 62.5 | 38.39 |
| 2003 | 85.28 | 16 | 74.7 | 37.34 |
| 2004 | 150.09 | 18 | 83.7 | 36.15 |
| 2005 | 295.52 | 23 | 100.3 | 35.1 |
| 2006 | 373.17 | 42 | 153.8 | 39.3 |
| 2007 | 740 | 51 | 165.5 | 37.17 |
| 2008 | 920 | 63 | 197.9 | 34.96 |
| 2009 | 1200 | 66.2 | 200.1 | 32.53 |
| 2010 | 1500 | 94 | 225.3 | 31.02 |
| 2011 | 1729 | 74.3 | 264.1 | 30.02 |
| 2012 | 2212 | 93.5 | 287.1 | 29.13 |
| 2013 | 2639 | 119 | 309.6 | 28.07 |
| 2014 | 3300 | 131.2 | 353.4 | 28.28 |
| 2015 | 3650 | 172.4 | 390.3 | 28.53 |
| 2016 | 5017.29 | 214.4 | 370.8 | 28.01 |
| 2017 | 6224.37 | 271.5 | 406.1 | 27.77 |
| 2018 | 8200 | 346.3 | 434.6 | 25.95 |
| 2019 | 10070 | 382.4 | 492.5 | 25.14 |

Sumber: Data penelitian (diolah)

Analisis Korelasi Karl Pearson

Berikut adalah hasil uji korelasi Karl Pearson menggunakan bantuan program SPSS:

Tabel 2.
Hasil Uji Korelasi Pearson

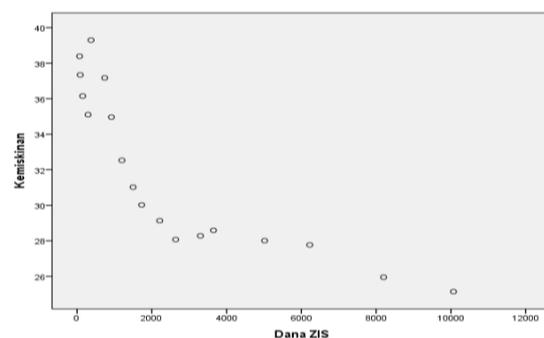
| | | Dana ZIS | DPK | Dana Pendidikan | Kemiskinan |
|-----------------|---------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| Dana ZIS | Pearson Correlation | 1 | .995** | .913** | -.834** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .000 |
| | N | 18 | 18 | 18 | 18 |
| DPK | Pearson Correlation | .995** | 1 | .918** | -.828** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dana Pendidikan | Pearson Correlation | .913** | .918** | 1 | -.933** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .000 |
| | N | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kemiskinan | Pearson Correlation | -.834** | -.828** | -.933** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 18 | 18 | 18 | 18 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (diolah)

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel di atas, terlihat nilai koefisien korelasi antara ZIS (X1) dan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y) adalah sebesar $r = -0.834$, sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti

ada hubungan antara dana ZIS dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. Nilai $r = -0.834$ menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara dana ZIS dan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. Adapun nilai signifikansi hasil korelasi antar keduanya adalah 0,000, sehingga korelasi antar variabel tersebut juga terbukti signifikan karena $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana ZIS memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Semakin naik dana ZIS yang dikumpulkan BAZNAS maka semakin menurun pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lapopo (2012) yang menyatakan bahwa dana ZIS berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia rentang periode tahun 1998-2010. Begitu pula dengan Seto (2016) yang menyatakan bahwa distribusi dana ZIS di BAZNAS berpengaruh dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2011-2014.



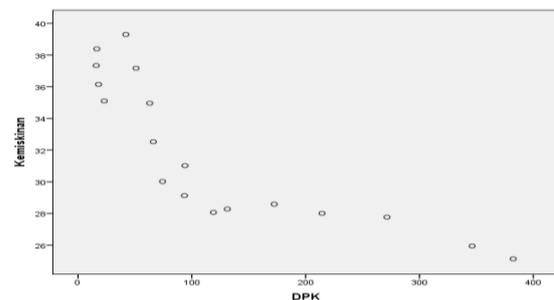
Sumber: SPSS (diolah)

Gambar 1.
Scatterplot Korelasi ZIS dan Kemiskinan

Selanjutnya, data SPSS juga menunjukkan nilai koefisien korelasi antara DPK (X2) dan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y) adalah sebesar $r = -0.828$, sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara DPK dan jumlah penduduk miskin di Indonesia rentang periode tahun 2002-2019. Nilai $r = -0.828$ menunjukkan korelasi negatif yang kuat antar dua variabel tersebut. Adapun nilai signifikansinya adalah 0.000, sehingga korelasi antar variabel tersebut terbukti signifikan karena $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPK memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Semakin naik DPK yang dialokasikan pemerintah maka semakin menurun pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Misdawita dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran subsidi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Begitu pula dengan penelitian Andaresta (2019) yang menyatakan bahwa bantuan sosial berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan 33 provinsi di Indonesia rentang periode tahun 2007-2017.

Adapun nilai koefisien korelasi (r) antara dana pendidikan (X3) dan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Y) juga menunjukkan korelasi negatif yang kuat, yakni sebesar $r = -0.933$, sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan

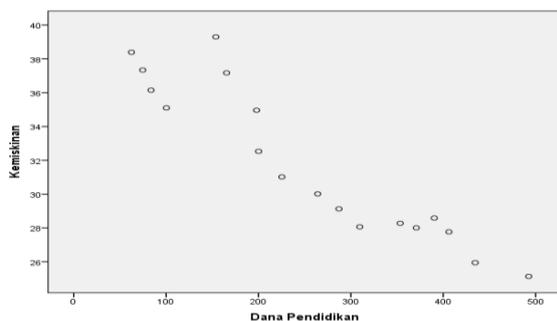
antara dana pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia rentang periode tahun 2002-2019.



Sumber: SPSS (diolah)

Gambar 2.
Scatterplot Korelasi DPK dan Kemiskinan

Nilai koefisien korelasi $-0,933$ tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara dua variabel tersebut. Adapun nilai signifikansi hasil korelasinya adalah sebesar 0.000, sehingga korelasi antar variabel tersebut terbukti signifikan karena $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dana pendidikan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Semakin naik dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah maka semakin menurun pula jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Seto (2016) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh dengan arah negatif baik secara parsial maupun simultan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2014. Begitu pula halnya dengan penelitian Misdawati dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2001-2012.



Sumber: SPSS (diolah)

Gambar 3.

Scatterplot Korelasi Dana Pendidikan dan Kemiskinan

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Dana ZIS memiliki hubungan yang erat dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2002-2019.
2. DPK memiliki hubungan yang erat dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2002-2019.
3. Dana pendidikan memiliki hubungan yang erat dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2002-2019.

Berikut adalah saran dalam penelitian ini:

1. BAZNAS supaya terus berinovasi dalam upaya sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajibnya pembayaran zakat serta dianjurkannya infaq dan sedekah. Selain itu, BAZNAS juga perlu menggalakkan peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap-tiap daerah termasuk pemberian legalitas masjid-masjid sebagai UPZ sebagai upaya maksimal dalam "menjemput bola" dari *muzakki*. Selanjutnya,

BAZNAS juga perlu berkoordinasi secara rutin dan berkala dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengenai daftar *mustahiq* supaya tidak ada data yang tumpang tindih sehingga penyaluran dana ZIS bisa dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

2. Pemerintah pusat supaya senantiasa menetapkan kebijakan terbaik dan pro-masyarakat dalam setiap program kerjanya, termasuk kebijakan untuk anggaran dana penanggulangan kemiskinan dan dana pendidikan sekaligus proses pengawalan penyaluran dananya. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa pemerintah daerah menyalurkan dana-dana tersebut secara tepat dan segera. Selain itu, pemerintah pusat juga hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara rutin dan berkala terkait data penerima bantuan dan evaluasi program yang ada.
3. Akademisi dan peneliti selanjutnya sebaiknya lebih berfokus pada tiap-tiap daerah jika berkaitan dengan topik program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui detail kondisi riil suatu daerah tentang bagaimana metode terbaik untuk mengukur tingkat kemiskinan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan.
4. Masyarakat diharapkan ikut serta mensukseskan seluruh program pemerintah, dengan beberapa cara,

baik secara materiil maupun non-materiil. *Pertama* terkait ZIS, hendaknya masyarakat membayarkan zakat fitrah, zakat maal dan zakat kontemporer di lembaga zakat yang telah mendapat legalitas dari pemerintah supaya pengelolannya lebih efektif dan efisien. *Kedua* terkait DPK, hendaknya masyarakat tidak hanya mengedepankan sikap konsumtif terhadap bantuan yang diberikan pemerintah tetapi masyarakat harus mengedepankan *mindset* produktif (mengelola dana untuk modal usaha) dan berpikir visioner untuk kesejahteraannya. *Ketiga* terkait dana pendidikan, hendaknya masyarakat bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan yang telah disediakan pemerintah secara mudah dan murah bahkan cuma-cuma (gratis).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Hukum-hukum zakat*. Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25-46.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, infaq, shadaqah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Auliah, R. (2019). *Analisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pasundan.
- BAPPENAS. (2009). *Penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- BAZNAS. (2018). *Statistik zakat nasional 2017*. Jakarta: Puskas Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2019). *Outlook zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa. *Jurnal Zakat & Empowering*, 2, 47-55.
- BPS. (2017). *Statistik 70 tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Badan Pusat Statistika Nasional Republik Indonesia.
- BPS. (2017). *Berita Resmi Statistik BPS Nasional: Kemiskinan Dalam Angka dan Persentase 1970-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistika Nasional Republik Indonesia.
- BPS. (2018). *Berita Resmi Statistik BPS Nasional: Kemiskinan Dalam Angka dan Persentase 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistika Nasional Republik Indonesia.
- BPS. (2019). *Berita Resmi Statistik BPS Nasional: Kemiskinan Dalam Angka dan Persentase 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistika Nasional Republik Indonesia.
- Damanhur & Nurainiah. (2016). Analisis pengaruh bantuan zakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Visioner & Strategis*, 5(2), 71-82.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an terjemah & asbabun nuzul*. Surakarta: PT Indiva Media Kreasi.
- Ghozi, S. & Aris S. (2015). *Statistik deskriptif untuk ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- KEMENKEU. (2019). *Anggaran pendidikan APBN 2002-2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KEMENKEU. (2019). *Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 2002-2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lapopo, J. (2012). Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di

- Indonesia periode 1998-2010. *Media Ekonomi*, 2(1), 83-108.
- Misdawita & A. Arini P. S. (2013). Analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 147-161.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada BAZNAS). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Ridho, M. (2019). *Analisis pengaruh zakat, pembiayaan syariah dan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN) terhadap pengentasan kemiskinan (Studi kasus: Di negara Indonesia dan Malaysia periode tahun 2002-2014)*. Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Rini, N., Nurul H. & Yosi M. P. P. (2013). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(1), 108-127.
- Sari, E. R. & Firdayetti. (2019). Analisis pengaruh zakat, infak, sedekah dan usyr (pajak impor) terhadap kemiskinan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(1), 39-46.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rossalia, I. (2019). *Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan zakat terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2017*. Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Prayogi, A. (2019). *Analisis kinerja BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Seto, H. (2016). *Pengaruh distribusi dana ZIS di BAZNAS Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2011-2014*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Setyowati, R. (2014). *Pengaruh alokasi dana program nasional pemberdayaan masyarakat, belanja daerah untuk kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur 2008-2011*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- TNP2K. (2010). *Penanggulangan kemiskinan: Situasi terkini, target pemerintah, dan program percepatan*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia.
- Winarti, A. (2014). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 1992-2012*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Diponegoro.
- Zahro, V. F. (2017). *Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatra Barat tahun 2013-2016*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.